

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI TENGAH DISPARITAS FISKAL: STUDI SMAN 1 LONG BAGUN

Anggy Hanggara¹, Norkumala Dewi², Arie EkaYudhistira Kirana Tejawati³,
Winaryati⁴, Widyatmike Gede Mulawarman⁵, Mukhamad Nurhadi⁶,
^{1, 2, 3, 4, 5} Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mulawarman

¹anggyhanggara@gmail.com, ²dnorkumala@gmail.com,
³ariekayudhistira@gmail.com, ⁴masriwinaryati@gmail.com
⁵widyatmike@fkip.unmul.ac.id, ⁶nurhadi@fkip.unmul.ac.id

ABSTRACT

This study examines the optimization of educational financing in the context of fiscal disparities, focusing on SMAN 1 Long Bagun in Mahakam Ulu Regency, a frontier, outermost, and disadvantaged (3T) area in Indonesia. The study addresses the challenges arising from unequal regional fiscal capacity, high operational costs due to geographical constraints, and limited managerial capacity in resource utilization. The objective of this research is to analyze how the school plans, allocates, and manages its financial resources, identify the constraints faced, and formulate adaptive and contextual financing strategies. This study employs a qualitative approach with a case study design, using purposive sampling to select key informants such as the principal, school treasurer, and school committee. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that fiscal disparities significantly influence the effectiveness of educational financing, where most of the budget is allocated for basic operational needs due to high logistical costs. Despite these limitations, the school demonstrates adaptive strategies through prioritization and efficient resource management. However, limited flexibility in budget use and low innovation in alternative funding remain key challenges. The study concludes that effective educational financing in 3T areas requires not only sufficient funding but also adaptive management, strengthened institutional capacity, and context-sensitive policy support to ensure equitable education quality.

Keywords: *fiscal disparity, education financing, 3T regions, school-based management, budget efficiency*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji optimalisasi pembiayaan pendidikan dalam konteks disparitas fiskal dengan fokus pada SMAN 1 Long Bagun di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Permasalahan utama yang diangkat adalah ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, tingginya biaya operasional akibat kondisi geografis, serta keterbatasan kapasitas manajerial dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perencanaan, alokasi, dan pengelolaan keuangan sekolah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi pembiayaan yang adaptif dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik purposive sampling dalam penentuan informan utama seperti kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas fiskal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan, di mana sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan operasional dasar akibat tingginya biaya logistik. Meskipun demikian, sekolah menunjukkan kemampuan adaptif melalui penetapan prioritas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, keterbatasan fleksibilitas anggaran serta rendahnya inovasi dalam sumber pendanaan alternatif masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pembiayaan pendidikan di wilayah 3T tidak hanya bergantung pada besaran dana, tetapi juga pada pengelolaan yang adaptif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang kontekstual guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.

Kata kunci: disparitas fiskal, pembiayaan pendidikan, wilayah 3T, manajemen berbasis sekolah, efisiensi anggaran

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Melalui pendidikan yang berkualitas, suatu bangsa dapat meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkeadilan menjadi tanggung jawab penting negara dalam memastikan setiap individu memperoleh akses yang sama terhadap layanan pendidikan yang layak.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penyelenggaraan pendidikan sebagian besar telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih memahami kebutuhan lokal dan mampu merespons secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan

desentralisasi tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah menjadi salah satu tantangan utama yang memicu ketimpangan dalam penyediaan layanan pendidikan. Daerah dengan kemampuan keuangan yang tinggi cenderung mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik, sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah (Arianto et al., 2018).

Selain itu, perbedaan dalam kemampuan manajerial dan perencanaan anggaran di tingkat daerah juga turut memperlebar kesenjangan tersebut. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Akibatnya, meskipun telah diberikan kewenangan yang lebih besar, hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal agar tujuan

pemerataan pendidikan dapat benar-benar terwujud.

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal pada awal tahun 2000-an, pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan melalui berbagai instrumen transfer ke daerah. Mekanisme seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjamin tersedianya layanan publik yang merata, termasuk di sektor pendidikan (Doriza et al., 2012; Simanjuntak & Mukhlis, 2014). Melalui kebijakan ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan prioritas wilayah masing-masing.

Namun demikian, dalam praktiknya, tujuan pemerataan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa disparitas fiskal antar daerah masih menjadi persoalan krusial yang berdampak langsung pada ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah (Rifa'i & Moddilani, 2021). Daerah dengan kapasitas fiskal

yang kuat cenderung mampu mengalokasikan anggaran pendidikan secara lebih optimal, baik dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana prasarana, maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan fiskal sering kali hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional dasar, sehingga sulit untuk melakukan inovasi dan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan.

Selain itu, efektivitas transfer fiskal juga sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran di tingkat daerah maupun satuan pendidikan. Dalam beberapa kasus, alokasi dana yang tersedia belum sepenuhnya diarahkan pada prioritas strategis yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan. Kurangnya kapasitas manajerial, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi faktor penghambat optimalisasi pemanfaatan dana pendidikan.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan transfer fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana yang diberikan, tetapi juga oleh

kemampuan pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal guna memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kesenjangan fiskal tercermin dari perbedaan kemampuan keuangan antar daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Rangkuti et al., 2024). Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi potensi ekonomi, sumber daya alam, serta kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Provinsi yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Timur cenderung memiliki pendapatan yang lebih besar melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Secara teoritis, kondisi ini memberikan peluang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa besarnya pendapatan daerah tidak secara otomatis menjamin efektivitas

penyelenggaraan pendidikan. Kondisi geografis yang menantang, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan, menjadi faktor utama yang meningkatkan biaya operasional pendidikan secara signifikan. Distribusi sarana prasarana, akses transportasi yang terbatas, serta kesulitan dalam pemerataan tenaga pendidik menyebabkan kebutuhan biaya yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan (Urriola et al., 2018).

Akibatnya, alokasi anggaran yang besar sering kali tidak diiringi dengan hasil yang optimal dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada besaran dana yang tersedia, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, serta ketepatan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. SMAN 1 Long Bagun di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan representasi nyata dari kompleksitas pembiayaan pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) (Nurhidayat & Dudung, 2019).

Sebagai sekolah yang berada di wilayah perbatasan, institusi ini menghadapi berbagai kendala struktural yang berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti pasokan listrik yang belum stabil dan akses jaringan internet yang terbatas, menjadi hambatan utama dalam mendukung proses pembelajaran yang adaptif dan berbasis teknologi.

Selain itu, keterbatasan akses transportasi menyebabkan distribusi sarana dan prasarana pendidikan menjadi kurang efisien dan memerlukan waktu serta biaya yang lebih besar. Kondisi ini juga berdampak pada minimnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, karena tidak semua guru bersedia ditempatkan di wilayah terpencil dengan fasilitas terbatas (Lengkong et al., 2023; Silvester et al., 2022). Akibatnya, beban kerja guru yang ada menjadi lebih tinggi dan berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran.

Di sisi lain, ketergantungan pada jalur Sungai Mahakam sebagai akses utama mobilitas barang dan manusia turut meningkatkan biaya logistik dan operasional pendidikan.

Hal ini menyebabkan kebutuhan anggaran menjadi lebih besar dibandingkan sekolah di wilayah perkotaan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan pembiayaan yang lebih efektif dan kontekstual (Itasari, 2020).

Ketimpangan akses dan mutu pendidikan antara wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dengan wilayah perkotaan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan (Vania et al., 2021). Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran dan kompetensi tenaga pendidik. Sekolah di wilayah 3T umumnya menghadapi keterbatasan sarana prasarana serta akses terhadap sumber belajar yang memadai.

Dalam kondisi tersebut, ketergantungan pada sumber pendanaan rutin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai belum cukup untuk menjawab berbagai kebutuhan pengembangan pendidikan. Dana BOS lebih banyak difokuskan pada pembiayaan operasional dasar, sehingga ruang untuk inovasi dan peningkatan mutu masih terbatas (Wirandana & Khoirunurrofik, 2022). Oleh karena itu,

diperlukan sumber pendanaan alternatif dan strategi pengelolaan yang lebih optimal agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya keuangan di SMAN 1 Long Bagun dalam konteks keterbatasan fiskal daerah. Analisis difokuskan pada bagaimana sekolah merencanakan, mengalokasikan, serta memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan, baik yang bersifat struktural maupun teknis.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi peserta didik di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai optimalisasi pembiayaan pendidikan dalam kondisi disparitas fiskal. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena sosial secara holistik dalam kondisi alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2020; Creswell, 2020). Desain studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu, yaitu SMAN 1 Long Bagun di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, sehingga memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik pembiayaan pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki keterbatasan akses, infrastruktur, serta kapasitas

fiskal daerah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Romadhon, 2023). Informan utama dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, bendahara sekolah, dan ketua komite sekolah, yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Selain itu, informan tambahan seperti pihak dinas pendidikan dapat dilibatkan untuk memperkaya perspektif data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman, persepsi, dan strategi pengelolaan pembiayaan pendidikan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sarana prasarana serta praktik pengelolaan keuangan di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Triangulasi metode digunakan untuk

meningkatkan kredibilitas data melalui perbandingan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi yang berkelanjutan dan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan kriteria trustworthiness yang meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Uji credibility dilakukan melalui triangulasi dan member check, sedangkan transferability dilakukan dengan penyajian deskripsi kontekstual yang rinci. Dependability dan confirmability dijaga melalui dokumentasi proses

penelitian secara sistematis serta penggunaan data yang objektif (Sugiyono, 2020).

Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menjelaskan dinamika pembiayaan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan fiskal..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Long Bagun dipengaruhi secara kuat oleh kondisi disparitas fiskal daerah, yang berimplikasi pada keterbatasan anggaran, tingginya biaya operasional, serta terbatasnya peluang peningkatan mutu pendidikan. Hasil ini secara langsung menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan dampak disparitas fiskal, praktik pengelolaan keuangan, berbagai kendala yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang diterapkan oleh sekolah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal tidak semata-mata berkaitan dengan besaran dana yang tersedia, tetapi juga dengan

meningkatnya struktur biaya akibat kondisi geografis wilayah 3T. Dengan demikian, hipotesis konseptual yang menyatakan adanya pengaruh disparitas fiskal terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan dapat dinyatakan terkonfirmasi oleh temuan penelitian ini.

Apabila ditinjau dari perspektif teori desentralisasi fiskal, hasil penelitian ini selaras dengan pandangan bahwa perbedaan kapasitas keuangan antar daerah dapat memicu ketimpangan dalam penyediaan layanan publik, termasuk sektor pendidikan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Runiasih dan Ahmad (2025) yang menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam pembiayaan pendidikan yang berdampak pada kualitas layanan. Selain itu, hasil penelitian ini konsisten dengan konsep efektivitas pembiayaan pendidikan yang menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran (*spending better*) dibandingkan peningkatan jumlah anggaran (*spending more*) (Rifa'i & Moddilani, 2021). Hal ini tercermin dari upaya sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan dana

melalui penetapan prioritas anggaran dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen berbasis sekolah telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Suryadi (2022) yang menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pembiayaan melalui pendekatan partisipatif dan pengambilan keputusan yang kontekstual. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran akibat regulasi yang bersifat ketat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa otonomi sekolah mampu meningkatkan efisiensi pembiayaan secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, tingkat otonomi tersebut belum sepenuhnya terealisasi karena masih dibatasi oleh kebijakan administratif yang berlaku.

Secara kritis, hasil penelitian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Dari sisi geografis, lokasi sekolah yang berada di wilayah terpencil menyebabkan peningkatan biaya operasional, terutama terkait transportasi dan distribusi logistik. Dari aspek sosial ekonomi, kondisi masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor ekonomi tradisional membatasi kontribusi masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan. Dari aspek kelembagaan, kebijakan pembiayaan yang cenderung seragam belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kontekstual wilayah 3T. Selain itu, keterbatasan kapasitas manajerial serta rendahnya inovasi dalam pengembangan sumber pembiayaan alternatif turut memengaruhi kondisi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jalnuhuubun dan Djutay (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial sekolah dalam mengelola sumber daya yang terbatas.

Implikasi dari temuan penelitian ini mencakup dimensi teoretis, praktis, dan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan

bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kondisi geografis dan kelembagaan. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas manajerial sekolah dalam mengelola pembiayaan secara efektif dan inovatif. Dari perspektif kebijakan, temuan ini menunjukkan perlunya perumusan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap karakteristik wilayah 3T agar distribusi dana dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena dilakukan pada satu lokasi dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Keterbatasan ini perlu menjadi perhatian dalam proses interpretasi hasil serta membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih luas dan komparatif.

Selain itu hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Long Bagun tidak dapat dipisahkan dari persoalan disparitas fiskal daerah, karakteristik

geografis wilayah 3T, serta kapasitas manajerial sekolah dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan pembiayaan pendidikan di daerah terpencil tidak semata berkaitan dengan kecukupan nominal anggaran, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi struktural dan operasional yang menentukan pola pemanfaatan anggaran tersebut. Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal, kondisi ini menguatkan pandangan bahwa perbedaan kapasitas keuangan antar daerah berdampak pada ketimpangan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mendukung asumsi awal bahwa disparitas fiskal memiliki pengaruh terhadap efektivitas pembiayaan pendidikan, khususnya pada sekolah di wilayah dengan keterbatasan akses dan tingginya biaya logistik.

Apabila dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan Runiasih dan Ahmad (2025) yang menunjukkan bahwa ketimpangan kapasitas fiskal berhubungan dengan perbedaan kemampuan pembiayaan pendidikan antar daerah. Kesesuaian tersebut tampak pada terbatasnya ruang fiskal

sekolah dalam melakukan pengembangan mutu karena sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan operasional dasar. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut semakin diperkuat oleh faktor geografis yang menyebabkan tingginya biaya transportasi, distribusi logistik, dan mobilitas tenaga pendidik dibandingkan wilayah perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan terdahulu dengan menunjukkan bahwa disparitas fiskal tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan kondisi spasial dan ketersediaan infrastruktur lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pembiayaan pendidikan di wilayah 3T perlu dipahami sebagai fenomena multidimensional, bukan sekadar persoalan distribusi dana.

Ditinjau dari teori efektivitas pembiayaan pendidikan, hasil penelitian ini juga selaras dengan gagasan bahwa kualitas pengelolaan anggaran memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan besaran anggaran itu sendiri. Konsep *spending better* sebagaimana dikemukakan oleh Rifa'i dan Moddilani (2021) relevan dalam menjelaskan strategi sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan dana melalui penentuan

prioritas, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta penyesuaian kebutuhan yang paling mendesak. Dalam hal ini, penelitian tidak menafikan pentingnya kecukupan anggaran, namun menegaskan bahwa dalam kondisi keterbatasan, efektivitas pembiayaan sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam mengelola dana secara selektif dan adaptif. Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah di wilayah 3T tidak bersifat pasif terhadap keterbatasan fiskal, melainkan berupaya membangun strategi adaptasi melalui pengelolaan internal yang lebih efisien.

Dalam aspek manajemen berbasis sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah dalam penyusunan RKAS mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan pembiayaan. Temuan ini mendukung Rahmawati dan Suryadi (2022) yang menyatakan bahwa manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan melalui pengambilan keputusan yang kontekstual. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan juga sejalan dengan Pratiwi et al. (2023) yang

menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa otonomi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan fleksibilitas yang optimal karena penggunaan anggaran masih dibatasi oleh regulasi administratif yang ketat. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung asumsi bahwa otonomi sekolah selalu berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi, melainkan menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh ruang kebijakan yang tersedia.

Temuan terkait keterbatasan sarana prasarana dan tingginya biaya operasional juga memperkuat hasil penelitian Fardila et al. (2024) serta Nisa et al. (2025), yang menegaskan bahwa sekolah di wilayah 3T cenderung memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya ruang untuk inovasi pembelajaran, pengembangan profesional guru, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Dalam penelitian ini, hal tersebut tercermin dari dominannya alokasi dana untuk operasional rutin,

sementara pengembangan kualitas pendidikan masih terbatas. Secara kritis, kondisi ini menunjukkan adanya hubungan erat antara struktur pembiayaan dan kemampuan sekolah dalam menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas. Ketika anggaran lebih banyak digunakan untuk mempertahankan operasional minimum, maka fungsi strategis pembiayaan sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan menjadi kurang optimal.

Temuan lain yang mengemuka adalah masih terbatasnya kapasitas manajerial dan rendahnya inovasi dalam diversifikasi sumber pembiayaan. Hasil ini sejalan dengan Jalnuhuubun dan Djutay (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pembiayaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan inovasi menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana pemerintah masih sangat dominan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya optimalisasi pembiayaan belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan. Dengan

demikian, temuan ini menegaskan bahwa tantangan pembiayaan pendidikan di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas kelembagaan sekolah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkuat pandangan bahwa pembiayaan pendidikan perlu dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan dimensi fiskal, geografis, sosial, dan kelembagaan secara terpadu. Penelitian ini tidak hanya mendukung teori desentralisasi fiskal dan manajemen berbasis sekolah, tetapi juga memperluas penerapannya pada konteks wilayah 3T. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kepala sekolah dan pengelola keuangan dalam perencanaan berbasis prioritas, efisiensi anggaran, serta inovasi pengelolaan sumber daya. Dari sisi kebijakan, temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih fleksibel, afirmatif, dan kontekstual, sehingga distribusi dana tidak hanya mempertimbangkan pemerataan administratif, tetapi juga

memperhitungkan beban operasional riil di daerah terpencil.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam proses interpretasi. Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada satu sekolah, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Dari aspek subjek, jumlah informan yang terbatas menyebabkan variasi perspektif masih berada dalam lingkup aktor utama di tingkat sekolah. Selain itu, kondisi geografis dan institusional SMAN 1 Long Bagun memiliki karakteristik khusus yang mungkin berbeda dengan wilayah 3T lainnya, sehingga interpretasi hasil perlu ditempatkan dalam konteks lokal penelitian.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif antar sekolah di beberapa wilayah 3T guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pola pembiayaan pendidikan. Penelitian berikutnya juga dapat mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menguji hubungan antara kapasitas fiskal,

efektivitas pengelolaan, dan mutu pendidikan secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperdalam kajian mengenai inovasi pembiayaan alternatif, kapasitas kepemimpinan sekolah, serta efektivitas kebijakan afirmatif pemerintah. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian manajemen pendidikan, khususnya terkait pembiayaan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan fiskal, sekaligus memberikan dasar reflektif bagi praktik pengelolaan pendidikan yang lebih adaptif dan berorientasi pada keadilan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Long Bagun sangat dipengaruhi oleh disparitas fiskal daerah, kondisi geografis wilayah 3T, serta keterbatasan kapasitas manajerial dalam pengelolaan keuangan. Keterbatasan fiskal tidak hanya tercermin dari jumlah anggaran yang tersedia, tetapi juga dari tingginya biaya operasional akibat akses yang sulit, distribusi logistik

yang mahal, serta keterbatasan infrastruktur. Akibatnya, sebagian besar anggaran sekolah terserap untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar, sehingga ruang untuk pengembangan mutu pendidikan menjadi terbatas.

Meskipun demikian, sekolah telah menunjukkan upaya adaptif melalui penerapan manajemen berbasis sekolah, seperti penentuan skala prioritas, efisiensi penggunaan anggaran, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan keuangan. Namun, efektivitas pengelolaan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan fleksibilitas anggaran akibat regulasi yang ketat serta rendahnya inovasi dalam pengembangan sumber pembiayaan alternatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pembiayaan pendidikan di wilayah 3T tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan alokasi dana, tetapi memerlukan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas manajerial sekolah, inovasi dalam diversifikasi sumber pendanaan, serta kebijakan

pemerintah yang lebih fleksibel dan afirmatif agar pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah terpencil dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber, dan waktu pada penelitian pendidikan. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 5(2), 146–150.
- Arianto, B., et al. (2018). Disparitas fiskal dan implikasinya terhadap pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), 45–58.
- Creswell, J. W. (2020). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Doriza, S., et al. (2012). Transfer fiskal dan pemerataan pembangunan daerah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(2), 101–115.
- Itasari, E. R. (2020). Tantangan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 567–580.

- Jalnuhuubun, M., & Djutay, S. (2024). Kapasitas manajerial dan efektivitas pembiayaan pendidikan di daerah terpencil. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1), 34–45.
- Lengkong, V. P. K., et al. (2023). Distribusi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 120–130.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nisa, K., et al. (2025). Keterbatasan sarana prasarana dan dampaknya terhadap mutu pendidikan di daerah 3T. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(1), 77–89.
- Nurhidayat, A., & Dudung, A. (2019). Pendidikan di wilayah 3T: Tantangan dan strategi pengembangan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(2), 89–98.
- Pratiwi, D., et al. (2023). Partisipasi stakeholder dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 10(3), 201–210.
- Rahmawati, R., & Suryadi, A. (2022). Manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1), 55–65.
- Rangkuti, R. K., et al. (2024). Disparitas fiskal antar daerah di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(2), 150–162.
- Rifa'i, A., & Moddilani, M. (2021). Efektivitas pembiayaan pendidikan dalam perspektif spending better. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 6(1), 23–34.
- Romadhon, M. (2023). Teknik purposive sampling dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 4(2), 88–95.
- Runiasih, N., & Ahmad, T. (2025). Kapasitas fiskal daerah dan implikasinya terhadap kualitas layanan pendidikan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 44–56.
- Silvester, S., et al. (2022). Tantangan distribusi guru di daerah terpencil Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(3), 210–220.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Urriola, R., et al. (2018). Geographic challenges and education service delivery in remote areas. *International Journal of Educational Development*, 60, 123–130.
- Vania, R., et al. (2021). Ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan 3T di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(2), 134–145.
- Wirandana, R., & Khoirunurrofik, K. (2022). Efektivitas dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 67–78.